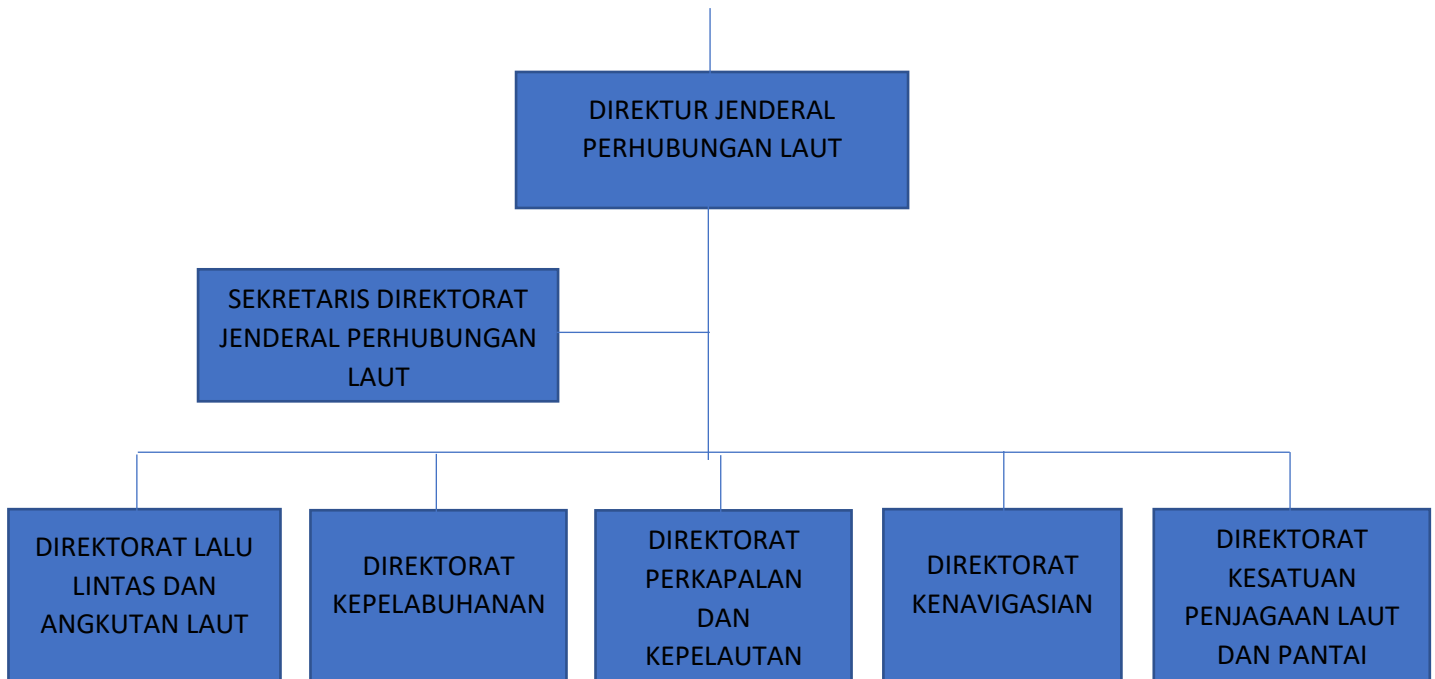


BAB I

PROFIL UNIT KERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

1. Tugas Pokok dan Fungsi Unit Kerja di Lingkungan Ditjen Hubla
Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2022 : Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan
2. Struktur Organisasi
Sampai dengan Eselon II

STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

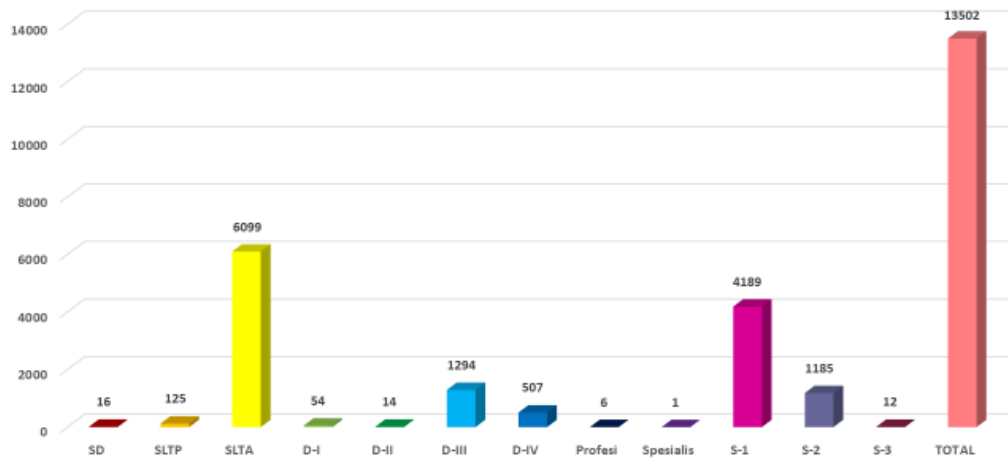


3. Komposisi Pegawai Tahun 2022

Pembagian pegawai berdasarkan kelamin, golongan, tingkat pendidikan, dsb.



REKAPITULASI PEGAWAI PER PENDIDIKAN



Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian DITJEN HUBLA



JUMLAH UNIT KERJA DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT



Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian DITJEN HUBLA

4. Visi dan Misi

Sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran adalah terwujudnya penyelenggaraan transportasi laut nasional yang efektif, efisien dan berdaya saing serta memberikan nilai tambah sebagai infrastruktur dan tulang punggung kehidupan berbangsa dan bernegara

5. Sejarah Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Sejarah lahirnya unit kerja, unit kerja dari tahun ke tahun, perubahan nomenklatur, peraturan organisasi, dsb.

BAB II

KILAS KINERJA UNIT KERJA TAHUN 2022

1. Unit Kerja Dalam Angka

- berisi ringkasan/ highlight dalam bentuk infografis terkait semua data yang dimiliki, misalnya jumlah pegawai, nilai kinerja unit kerja berdasarkan IKU atau IKK, realisasi belanja, jumlah sarana dan prasarana yang berhasil dibangun/direvitalisasi, dsb.
- dapat juga memperbandingkan tren sebelumnya dengan saat ini.

2. Peristiwa Penting

- resume peristiwa penting selama satu tahun, misalnya peringatan Hari Nusantara, penandatanganan MoU, capaian kinerja (target dan realisasi, rakor, dsb).

3. Penghargaan Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2022

- penghargaan yang diperoleh unit kerja yang berupa piala/sertifikat/plakat yang dianggap signifikan dan/atau berskala nasional internasional.

Kegiatan Kerja Sama Luar Negeri dan Perjanjian Internasional

1. Rapat Koordinasi Persiapan Pencalonan Indonesia sebagai Anggota Dewan IMO Periode 2024-2025 tanggal 22-23 Desember 2022 yang dihadiri 53 peserta.



2. Pertemuan Bilateral 7th DGST-MPA Officers Dialogue dan 16th DGST-MPA Training MOU Meeting tanggal 5-7 Desember di Bali di hadiri oleh 30 delegasi dari Singapura dan Indonesia.



3. Terdapat 2 MoU yang ditanda-tangani pada tahun 2022, yaitu:

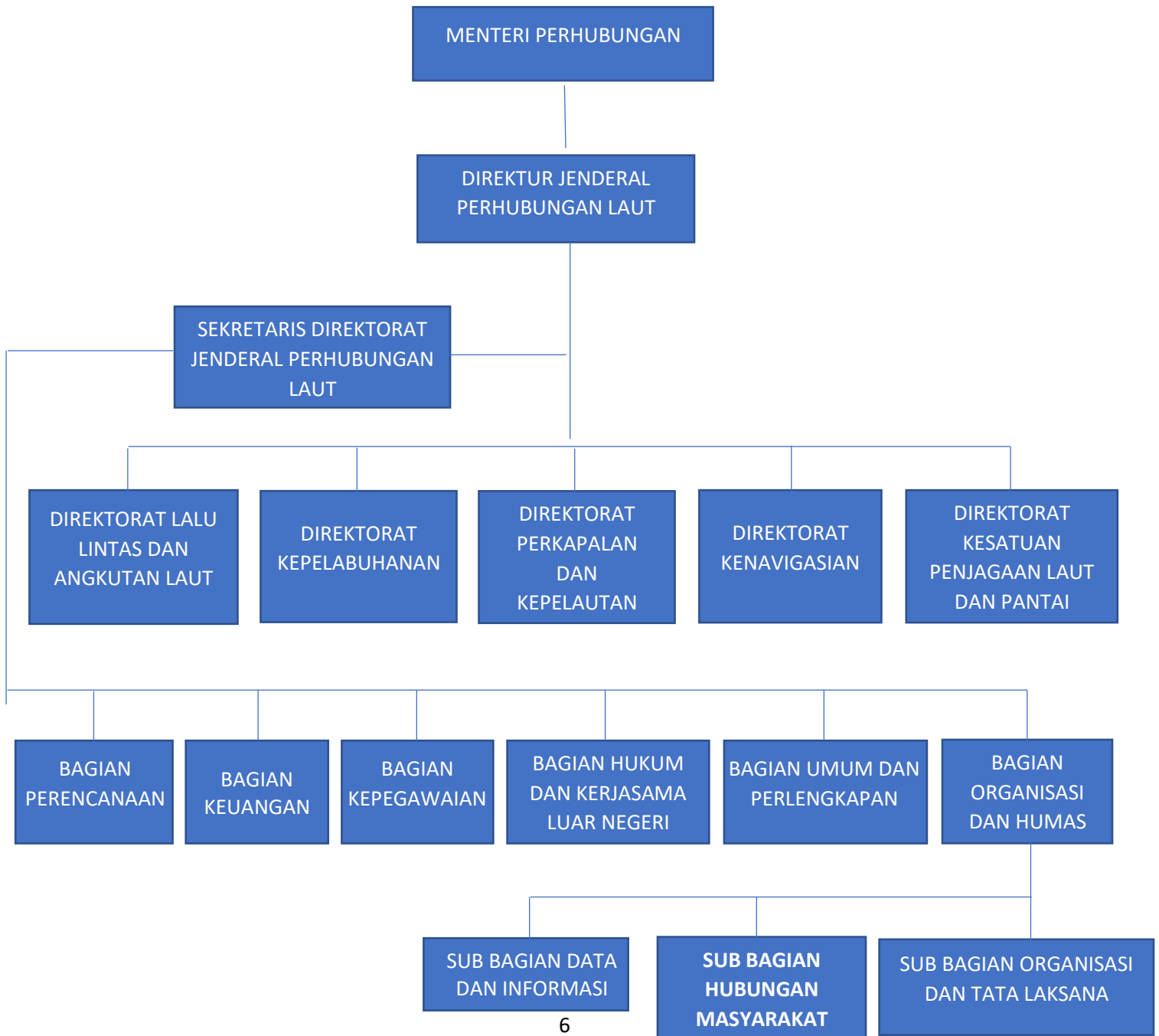
- Agreement on Mutual Recognition of Certification of Fishing Vessel Personnel Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Kingdom of Spain
- MoU Between the Maritime and Port Authority of Singapore and the Directorate General of Sea Transportation, the Ministry of Transportation of the Republic of Indonesia Concerning Co-operation on Human Resources Development of the Government Officers in the Maritime Field

BAB III

SUMBER DAYA MANUSIA UNIT KERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

1. Profil SDM Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan

STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN



BIMBINGAN TEKNIS (BIMTEK)

1. Bimtek Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan.

Telah dilaksanakan Bimtek Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan di 2 (dua) lokasi yaitu :

- a. Hotel Morrissey Jakarta, pada tanggal 30 Oktober s.d 02 November 2022 yang dihadiri 30 peserta perwakilan dari pemerintah provinsi maupun kabupaten serta perwakilan internal Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
- b. Hotel Raffles Jakarta, Pada Tanggal 21 s.d 24 Desember 2022 dalam rangka Finalisasi yang dihadiri oleh 30 peserta perwakilan dari Pemerintah Provinsi maupun kabupaten serta perwakilan internal Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.



Gambar III.1 Bimtek Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan

2. Bimbingan Teknis Evaluasi dan Penilaian Dokumen Kajian Kelayakan Konsesi Atau Kerjasama Dalam Pengusahaan Alur Pelayaran

Telah dilaksanakan Bimbingan Teknis Evaluasi dan Penilaian Dokumen Kajian Kelayakan Konsesi Atau Kerjasama Dalam Pengusahaan Alur Pelayaran di Bertempat di Luminor Hotel Kota pada tanggal 22 s.d 24 September 2022 dengan di hadiri oleh peserta, output berupa Laporan.

Tabel III.1

Bimbingan Teknis Evaluasi dan Penilaian Dokumen Kajian Kelayakan Konsesi Atau Kerjasama Dalam Pengusahaan Alur Pelayaran

No	Materi/Pembahasan
1	Standar Dokumen dan Pedoman Evaluasi serta Penilaian Dokumen Kajian Kelayakan Konsesi dalam Pengusahaan Alur Pelayaran Atas Prakarsa Badan Usaha Pelabuhan, Badan Usaha Pengerukan dan Reklamasi, dan/atau Badan Usaha Patungan Antara Badan Usaha dan Badan Usaha Pengerukan dan Reklamasi
2	Evaluasi Financial Konsesi Kepelabuhanan
3	Konsesi dan Kerjasama dalam pngusahaan Alur Pelayaran



Gambar III.1

Bimbingan Teknis Evaluasi Dan Penilaian Dokumen Kajian Kelayakan Konsesi Atau Kerjasama Dalam Pengusahaan Alur Pelayaran

3. Bimtek Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan.

Telah dilaksanakan Bimtek Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan di 2 lokasi yaitu :

- a. Hotel Shangri-La Jakarta, pada tanggal 29 Agustus s.d 01 September 2022 yang dihadiri **40** orang peserta
- b. Hotel Morrissey Jakarta, pada tanggal 26 s.d 28 Oktober 2022 yang dihadiri **35** orang peserta



Gambar III.2

Bimtek Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan

PROFIL DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan merupakan institusi penyelenggara transportasi laut di Indonesia, yang memiliki tugas untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang perhubungan laut guna menunjang pertumbuhan perekonomian Indonesia.

Pelaksanaan kebijakan strategis transportasi laut, mengacu pada Undang – Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, yang terdiri dari 4 sub sistem perhubungan laut yang menjadi ruang lingkup pekerjaan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, yaitu :

1. Angkutan di Perairan
2. Kepelabuhanan
3. Keselamatan dan Keamanan Pelayaran, serta
4. Perlindungan Lingkungan Maritim

Dalam menjalankan tugasnya, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal dan dibantu oleh 5 Direktorat teknis yaitu :

1. Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut
2. Direktorat Kepelabuhanan
3. Direktorat Perkapalan dan Kepelautan
4. Direktorat Kenavigasian
5. Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai

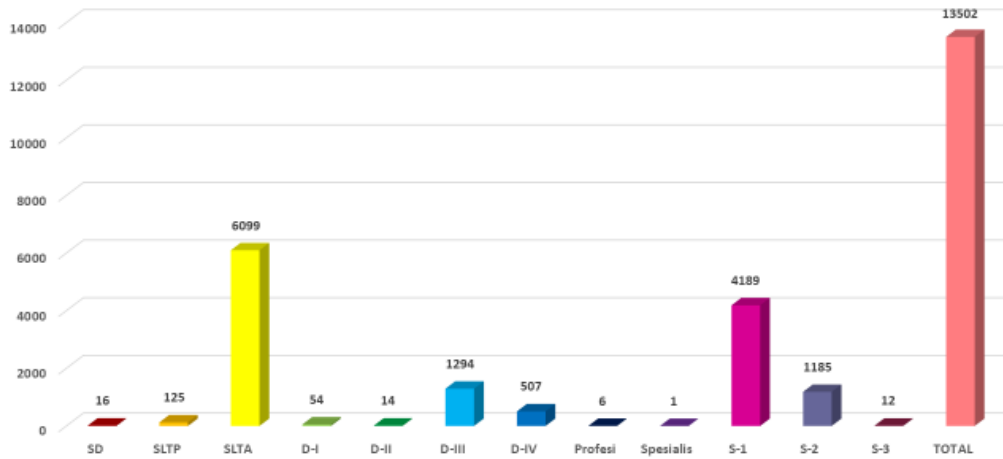
Sedangkan fungsi administrasi dilaksanakan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, yang terdiri dari 6 Bagian, yaitu :

1. Bagian Perencanaan
2. Bagian Keuangan
3. Bagian Kepegawaian
4. Bagian Hukum dan Kerjasama Luar Negeri
5. Bagian Umum dan Perlengkapan
6. Bagian Organisasi dan Hubungan Masyarakat

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut merupakan salah satu unit kerja yang memiliki jumlah pegawai terbesar di Kementerian Perhubungan dan memiliki 296 Unit Pelaksana Teknis (UPT) di seluruh Indonesia.



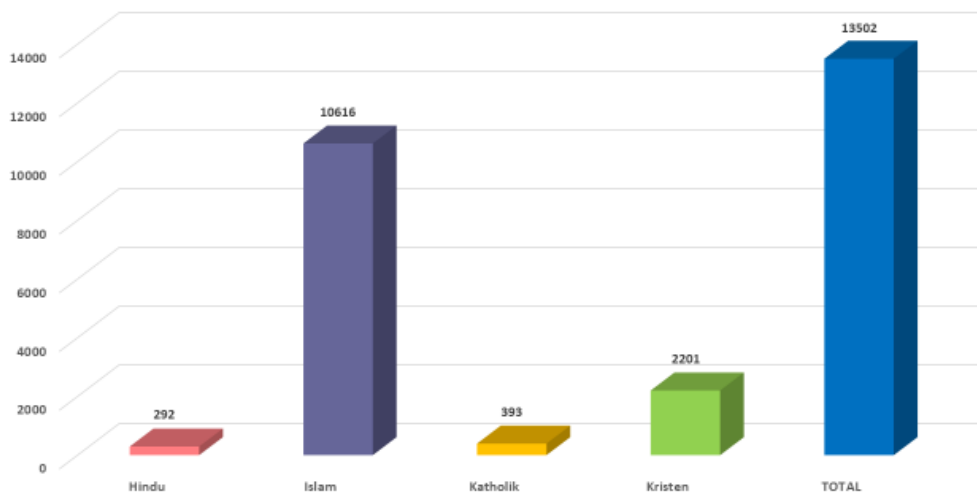
REKAPITULASI PEGAWAI PER PENDIDIKAN



Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian DITJEN HUBLA



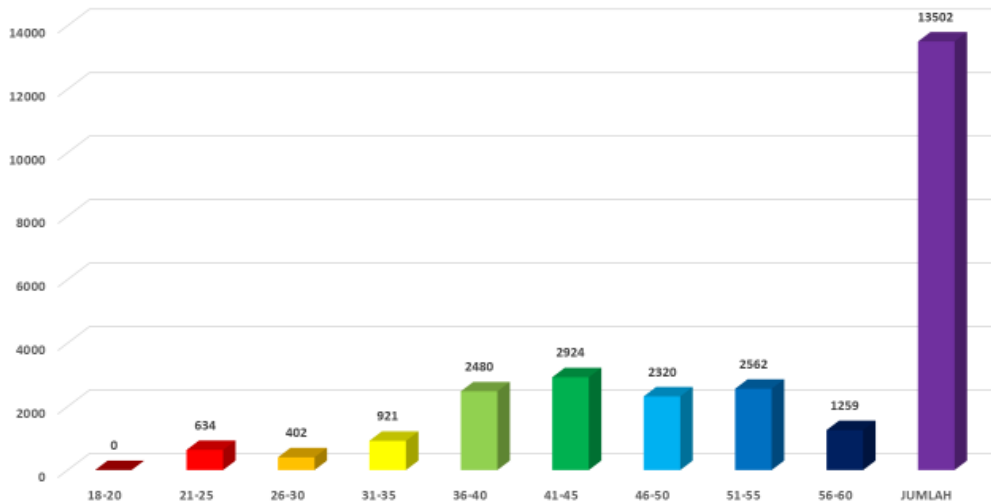
REKAPITULASI PEGAWAI PER AGAMA



Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian DITJEN HUBLA



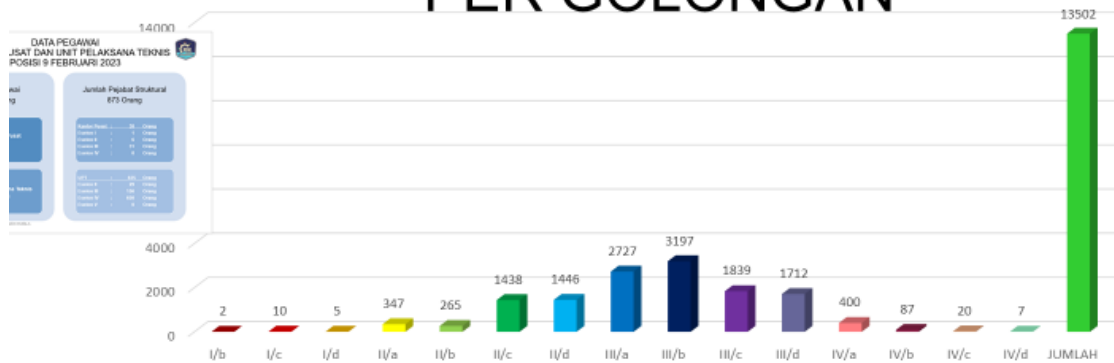
REKAPITULASI PEGAWAI PER USIA



Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian DITJEN HUBLA



REKAPITULASI PEGAWAI PER GOLONGAN



JENIS KELAMIN



Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian DITJEN HUBLA



JUMLAH UNIT KERJA DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT



Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian DITJEN HUBLA



DATA PEGAWAI KANTOR PUSAT DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS POSISI 9 FEBRUARI 2023



Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian DITJEN HUBLA

- Misalnya jabatan yang ada di unit kerja dan jumlah pemangkunya
- Dapat juga menampilkan struktur organisasi yang lebih lengkap per-direktorat.
- Pengelolaan SDM Unit Kerja pada masing-masing Unit Kerja
- Peningkatan Kapasitas SDM Unit Kerja di Lingkungan Ditjen Hubla
- Pengawasan dan Penegakan Disiplin Unit Kerja di Lingkungan Ditjen Hubla

BAB IV KEGIATAN STRATEGIS

DIREKTORAT KENAVIGASIAN

A. Program Kegiatan

Program Kegiatan Strategis pada Direktorat Kenavigasian Tahun Anggaran 2022 yang mengacu pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2022 dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pengadaan Boat Survey 2 (dua) Unit;
2. *DEVELOPMENT AND IMPROVEMENT OF INDONESIAN AIDS TO NAVIGATION (ATON) ON ECONOMIC DEVELOPMENT COOPERATION FUND (EDCF) LOAN PROGRAMME;*

B. Realisasi

1. Pengadaan Boat Survey 2 (dua) unit

Telah dilaksanakan Pengadaan Boat Survey 2 (dua) unit sebagai berikut :

NO	NAMA BOAT SURVEY	LOKASI
1	Boat Survey Breueh	Disnav Sabang
2	Boat Survey Tanjung Matoa	Disnav Bajarmasin



DIREKTORAT LALU LINTAS DAN ANGKUTAN LAUT

A. Program Kegiatan

Anggaran program kegiatan melalui belanja pemerintah yang telah dilaksanakan telah mengacu pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut Tahun Anggaran 2022 dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut Tahun Anggaran 2022 yang digunakan untuk mendanai kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan penyelenggaraan subsidi angkutan laut keperintisan terdiri dari;
 - a. Penyelenggaraan layanan angkutan laut perintis mekanisme penugasan 44 trayek dengan nilai pagu 515.792.707.000.- dengan realiasi anggaran sebesar Rp. 515.791.695.237.- dan realisasi 1.119 voyage.
 - b. Penyelenggaraan layanan angkutan laut perintis mekanisme pelelangan swasta 73 trayek dengan nilai pagu 760.847.604.191.- dengan realiasi anggaran sebesar 740.142.824.968.- dan realisasi voyage 1.838 voyage.
2. Penyelenggaraan angkutan barang tol laut dengan nilai pagu 420.839.409.000.
 - a. Penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik (subsidi) angkutan barang dilaut dengan mekanisme penugasan dengan pagu Rp. 234.414.883.000.-
 - b. Penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik (subsidi) angkutan barang dilaut dengan mekanisme swasta dengan pagu Rp. 186.424.562.000.-
3. Subsidi pengoperasian kapal ternak dengan nilai pagu 61.542.008.000.-
 - a. Pelayanan angkutan kapal ternak dengan mekanisme penugasan dengan nilai pagu 20.556.580.000.-
 - b. Pelayanan angkutan kapal ternak dengan mekanisme swasta dengan nilai pagu 40.985.428.000.-
4. Kapal rede;
5. Pengembangan dan pemeliharaan sistem inaportnet, sistem pelayanan terpadu, (SIMPADU) dan sistem persetujuan syahbandar (SPS) dengan nilai pagu Rp. 2.430.412.71

BAGIAN PERENCANAAN

A. Program Kegiatan

Program Kegiatan Strategis pada Bagian Perencanaan Tahun Anggaran 2022 yang mengacu pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2022 dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Kegiatan Reviu Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang didalamnya terdapat Indikator dan lampiran Pendanaan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Studi Pra Kelayakan (Pre FS) Pembangunan Pelabuhan Laut di 14 Lokasi Kabupaten (Pesawaran, Bulukumba, Bone, Minahasa Utara, Kupang, Maluku Barat Daya, Kep. Tanimbar, Buru, Kep. Sula, Kotabaru, Bolaang Mongondow Selatan, Raja Ampat, Biak Numfor Dan Merauke).

B. REALISASI

Berikut terlampir detail pelaksanaan kegiatan dimaksud

1. Penyelenggaraan Kegiatan Reviu Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

a) Latar belakang

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan laut Nomor KP.936/DJPL/2020 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024. Renstra Ditjen Perhubungan Laut 2020-2024 merupakan dokumen yang menjadi dasar pelaksanaan berbagai agenda Pembangunan Nasional di Bidang Transportasi Laut sesuai dengan amanat UU 17/2008 tentang Pelayaran di mana untuk perioda 2020-2024 mengikuti arahan Presiden dalam RPJM 2020-2024 yang diejawantahkan dalam Renstra Kementerian Perhubungan 2020-2024.

Selama kurun waktu 2020-2022 terdapat banyak perkembangan yang menyebabkan perlunya dilakukan reviu/perubahan terhadap Renstra Ditjen Perhubungan Laut 2020-2024, diantaranya :

- 1) Adanya **pandemi Covid-19** menyebabkan adanya perubahan dalam permintaan perjalanan maupun tatanan interaksi pada sistem transportasi laut memasuki era New-Normal.
- 2) Adanya **Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP)** yang membutuhkan adanya penyesuaian dalam struktur sasaran dan indikator kinerja (termasuk sebagai respon terhadap masukan dari Itjen Kemenhub dan Kemen PAN-RB).
- 3) Adanya **refocusing APBN/APBD bidang transportasi laut** baik karena difokuskan untuk penanganan pandemi Covid-19 maupun sebagai dampak dari perlambatan ekonomi dalam beberapa tahun terakhir.
- 4) Adanya **perubahan organisasi** di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Kegiatan Reviu Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan dengan waktu pelaksanaan sebagai berikut :

NO	Detail Pelaksanaan	Keterangan
1	Pelaksanaan Penyusunan Dokumen Reviu Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020 - 2024	Dilaksanakan melalui mekanisme jasa konsultansi (studi) selama 5 (lima) bulan dan menghasilkan output berupa konsep dokumen untuk perubahan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
2	FGD Reviu Renstra DJPL	Dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 2022 yang bertujuan untuk untuk menggali masukan dari para stakeholder terkait
3	Konsinyering Penyusunan Indikator dan Pendanaan	Dilaksanakan sebagai salah satu unsur penunjang dokumen reviu renstra dan menggali masukan dari unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut guna penyempurnaan indikator kinerja serta penyesuaian kerangka pendanaan

Terlampir beberapa dokumentasi pada saat kegiatan berlangsung :



Penyempurnaan konsep dokumen Reviu Rencana Strategis Direktorat jenderal Perhubungan Laut masih terus berlanjut mengingat penyempurnaan Indikator dan kerangka pendanaan masih memerlukan sinkronisasi dan penelarasan dengan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) serta persiapan penyusunan Sasaran Kinerja sampai dengan level individu.

2. Kegiatan Studi Pra Kelayakan (Pre FS)

a. Maksud

Untuk menentukan prioritas lokasi rencana pembangunan pelabuhan di Kabupaten/Kota yang layak berdasarkan aspek tata ruang, transportasi, sosial, ekonomi, status lahan, lingkungan dan teknis pelabuhan yang disesuaikan dengan kebijakan yang ada, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

b. Tujuan

- 1) Mengidentifikasi infrastruktur transportasi pelabuhan laut, pelabuhan penyeberangan sungai dan danau, pelabuhan perikanan, pelabuhan pariwisata, Tersus/TUKS dan pelabuhan lainnya di wilayah studi.
- 2) Mengidentifikasi infrastruktur transportasi untuk calon lokasi rencana pelabuhan laut di wilayah studi.
- 3) Mengevaluasi calon lokasi rencana pelabuhan laut di wilayah studi.
- 4) Menentukan prioritas lokasi pembangunan infrastruktur pelabuhan laut.
- 5) Mengetahui deskripsi kebutuhan riil pembangunan pelabuhan baru pada suatu wilayah tertentu berdasarkan pertimbangan aspek ekonomi, sosial dan teknis sehingga rekomendasi indikasi paling layak pada wilayah tersebut tersebut guna dapat dilanjutkan secara optimal untuk kegiatan Studi Kelayakan dan seterusnya.

c. Keluaran

Keluaran berupa Laporan yang berisi penjelasan hasil studi berdasarkan analisis dari semua aspek terkait, tanggapan terhadap hasil analisis serta rekomendasi suatu kawasan (*region*) terhadap potensi permintaan (*demand*) apakah suatu rencana kegiatan layak untuk dikaji dengan Studi Kelayakan (*Feasibility Study*).

d. Manfaat

kegiatan kajian ini diharapkan akan dapat membantu tersusunnya output berupa penentuan prioritas lokasi pembangunan pelabuhan baru/alternatif indikasi lokasi sesuai dengan kebutuhan wilayah dan pemenuhan konektivitas nasional yang terintegrasi dengan pengembangan jaringan transportasi laut.

1. Merupakan kegiatan strategis yang berhasil dicapai oleh seluruh unit organisasi/ unit kerja/ UPT selama kurun waktu satu tahun.
2. Kegiatan strategis, berisi uraian kegiatan dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. peristiwa penting yang dianggap paling signifikan, berskala nasional dan/atau internasional;
 - b. kegiatan yang melibatkan figur atau Menteri/Pejabat unit organisasi Eselon I Kementerian Perhubungan; kegiatan yang menunjang program kerja Presiden

BAB V

PENYEDIAAN SARANA

1. KEGIATAN PEMBANGUNAN

a. Pembangunan Kapal Patroli Kelas IV

Kapal patroli ini dibangun dengan tujuan untuk menjadi sarana dalam menjamin keamanan dan keselamatan pelayaran melalui tugas patroli, pengamanan, penegakan hukum, serta pencarian dan pertolongan. Adapun Rincian Pekerjaan Pembangunan Kapal Patroli Kelas IV sebagai berikut :

Tabel V.1

Pembangunan Kapal Patroli Kelas IV

Paket	Waktu pelaksanaan	Penempatan
Kelas IV	2021- 2022	1. UPP Kelas I Tobelo 2. KSOP Kelas IV Kalianget 3. UPP Kelas II Branta 4. KSOP Kelas III Biak



KN.P 4002



KN.P 4003



KN.P 4004



KN.P 4005

GAMBAR V.1 PEMBANGUNAN KAPAL PATROLI KELAS IV

b. Pembangunan Kapal Patroli Kelas V

Kapal patroli ini dibangun dengan tujuan untuk menjadi sarana dalam menjamin keamanan dan keselamatan pelayaran melalui tugas patroli, pengamanan, penegakan hukum, serta pencarian dan pertolongan.

Tabel V.2: Pembangunan Kapal Patroli Kelas V

Paket	Waktu pelaksanaan	Penempatan
KN.P 5255	2021 – 2022	KSOP Kelas IV Laurentius Say (NTT)
KN.P 5256	2021 – 2022	UPP Kelas II Reo (NTT)
KN.P 5257	2021 – 2022	UPP Kelas III Sapeken (Jawa timur)
KN.P 5258	2021 – 2022	UPP Kelas III Molawe (Sulteng)
KN.P 5259	2021 – 2022	UPP Kelas III Calabai (NTB)
KN.P 5260	2021 – 2022	UPP Kelas III Teminabuan (Papua-Barat)
KN.P 5261	2021 – 2022	UPP Kelas III Bade (Papua)
KN.P 5262	2021 – 2022	KSOP Kelas III Pulau Baai (Bengkulu)
KN.P 5263	2021 – 2022	UPP Kelas III Korido (Papua)
KN.P 5264	2021 – 2022	UPP Kelas III Pangandaran (Jawa Barat)



KN.P 5255



KN.P 5256



KN.P 5257



KN.P 5258



KN.P 5259



KN.P 5260



KN.P 5261



KN.P 5262



KN.P 5263



KN.P 5264

GAMBAR V.2 PEMBANGUNAN KAPAL PATROLI KELAS V

BAB VI

PENYEDIAAN PRASARANA

2. KEGIATAN PEMBANGUNAN/PENGADAAN

a. Pengadaan Perizinan, dan Distribusi Senjata Api serta Amunisi

Pada Tahun Anggaran 2022, Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) telah melaksanakan kegiatan Pengadaan, Perizinan, dan Distribusi Senjata Api serta Amunisi. Senjata api dan amunisi tersebut akan diperuntukkan kepada ABK Kapal Patroli KPLP lingkup Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang belum dilengkapi senjata dalam melaksanakan tugas operasional yaitu melakukan patroli keselamatan, penjagaan dan penegakan hukum di perairan Indonesia. Pengadaan ini dilaksanakan pada bulan Juni-Desember 2022 dan ditempatkan di Kapal Patroli KPLP dengan rincian sebagai berikut :

NO	Nama Kapal	UPT	No Senpi
1	KN.P. 356	Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok	CC.FW000253
2	KN.P. 356	Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok	CC.FW000254
3	KN.P. 461	Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok	CC.FW000257
4	KN.P. 488	Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok	CC.FW000258
5	KN.P. 355	KSOP Kelas IV Kepulauan Seribu	CC.FW000252
6	KN TRISULA - P. 111	PLP Kelas I Tanjung Priok	CC.FW000240
7	KN. Damaru - P.214	PLP Kelas I Tanjung Priok	CC.FW000255
8	KN. Jembio - P.215	PLP Kelas I Tanjung Priok	CC.FW000256
9	KN.Kujang P.201	PLP Kelas I Tanjung Priok	CC.FW000241
10	KN.Kujang P.201	PLP Kelas I Tanjung Priok	CC.FW000242
11	KN.Celurit P.203	PLP Kelas I Tanjung Priok	CC.FW000243
12	KN.Celurit P.203	PLP Kelas I Tanjung Priok	CC.FW000244
13	KN.Cundrik P.204	PLP Kelas I Tanjung Priok	CC.FW000245
14	KN.Cundrik P.204	PLP Kelas I Tanjung Priok	CC.FW000246
15	KN.Belati P.205	PLP Kelas I Tanjung Priok	CC.FW000247
16	KN.Golok P.206	PLP Kelas I Tanjung Priok	CC.FW000248
17	KN.Alugara P 114	PLP Kelas I Tanjung Priok	CC.FW000249
18	KN.P.348	PLP Kelas I Tanjung Priok	CC.FW000250

NO	Nama Kapal	UPT	No Senpi
19	KN.P.348	PLP Kelas I Tanjung Priok	CC.FW000251
20	KN.P 330	KSOP Khusus Batam	CC.FW000260
21	KN.P 376	KSOP Khusus Batam	CC.FW000267
22	KN.P. 5249	KSOP Khusus Batam	CC.FW000268
23	KN. Kalimasadha P.115	Pangkalan PLP Kelas II Tanjung Uban	CC.FW000259
24	KN. Sarotama P.112	Pangkalan PLP Kelas II Tanjung Uban	CC.FW000335
25	KN.Rantos - P.210	Pangkalan PLP Kelas II Tanjung Uban	CC.FW000261
26	KN.P. 406	Pangkalan PLP Kelas II Tanjung Uban	CC.FW000266
27	KN.P 543	Pangkalan PLP Kelas II Tanjung Uban	CC.FW000262
28	KN.P 544	Pangkalan PLP Kelas II Tanjung Uban	CC.FW000263
29	KN.P 546	Pangkalan PLP Kelas II Tanjung Uban	CC.FW000264
30	KN.P 547	Pangkalan PLP Kelas II Tanjung Uban	CC.FW000265
31	KN. CHUNDAMANI - P.116	Pangkalan PLP Kelas II Tanjung Perak	CC.FW000269
32	KN. GRANTIN - P.211	Pangkalan PLP Kelas II Tanjung Perak	CC.FW000270
33	KN.P. 329	Pangkalan PLP Kelas II Tanjung Perak	CC.FW000273
34	KN.P. 329	Pangkalan PLP Kelas II Tanjung Perak	CC.FW000274
35	KN.P. 371	Pangkalan PLP Kelas II Tanjung Perak	CC.FW000275
36	KN.P. 371	Pangkalan PLP Kelas II Tanjung Perak	CC.FW000276
37	KN.P 365	KSOP Kelas II Gresik	CC.FW000271
38	KN. P 50015	KSOP Kelas II Gresik	CC.FW000272
39	KN.P. 498	KSOP Kelas IV Panarukan	CC.FW000277
40	KN.P 338	KSOP Kelas I Ambon	CC.FW000284
41	KN. Kalawai - P.117	Pangkalan PLP Kelas II Tual	CC.FW000282
42	KN. Salawaku - P. 213	Pangkalan PLP Kelas II Tual	CC.FW000278
43	KN. Parang P.202	Pangkalan PLP Kelas II Tual	CC.FW000279
44	KN. Parang P.202	Pangkalan PLP Kelas II Tual	CC.FW000280
45	KN. Parang P.202	Pangkalan PLP Kelas II Tual	CC.FW000281
46	KN.P. 364	Pangkalan PLP Kelas II Tual	CC.FW000286
47	KN.P. 364	Pangkalan PLP Kelas II Tual	CC.FW000287
48	KN.P 334	UPP Kelas II Tual	CC.FW000285

NO	Nama Kapal	UPT	No Senpi
49	KN.P 5234	UPP Kelas III Wonoreli	CC.FW000283
50	KN. P 380	KSOP Kelas II Bitung	CC.FW000291
51	KN. P 380	KSOP Kelas II Bitung	CC.FW000292
52	KN. Pasatimpo - P.212	Pangkalan PLP Kelas II Bitung	CC.FW000288
53	KN.P. 331	Pangkalan PLP Kelas II Bitung	CC.FW000293
54	KN.P. 331	Pangkalan PLP Kelas II Bitung	CC.FW000294
55	KN.P 50002	Pangkalan PLP Kelas II Bitung	CC.FW000289
56	KN.P 50048	Pangkalan PLP Kelas II Bitung	CC.FW000290
57	KN.P. 357	KSOP Kelas II Cirebon	CC.FW000295
58	KN.P. 337	KSOP Kelas I Tanjung Emas	CC.FW000296
59	KN.P. 337	KSOP Kelas I Tanjung Emas	CC.FW000297
60	KN.P. 337	KSOP Kelas I Tanjung Emas	CC.FW000298
61	KN.40007	KSOP Kelas I Tanjung Emas	CC.FW000302
62	KN.P. 374	KSOP Kelas II Cilacap	CC.FW000299
63	KN.P. 374	KSOP Kelas II Cilacap	CC.FW000300
64	KN.P. 425	KSOP Kelas II Cilacap	CC.FW000301
65	KN.P.373	UPP Kelas II Maccini Baji	CC.FW000303
66	KN.P. 332	KSU Belawan	CC.FW000305
67	KN.P. 332	KSU Belawan	CC.FW000306
68	KN.P. 463	KSU Belawan	CC.FW000304
69	KN.P. 367	KSOP Kelas IV Sibolga	CC.FW000307
70	KN.P 370	KSOP Kelas II Kendari	CC.FW000309
71	KN.P 353	KSOP Kelas II Bau Bau	CC.FW000308
72	KN.P. 358	KSOP Kelas II Ternate	CC.FW000310
73	KN.P. 358	KSOP Kelas II Ternate	CC.FW000311
74	KN.P. 375	UPP Kelas III Soasio	CC.FW000312
75	KN.P. 375	UPP Kelas III Soasio	CC.FW000313
76	KN.P 349	KSOP Kelas I Balikpapan	CC.FW000314
77	KN.P 349	KSOP Kelas I Balikpapan	CC.FW000315
78	KN.P. 497	KSOP Kelas I Balikpapan	CC.FW000317
79	KN.P. 555	KSOP Kelas I Balikpapan	CC.FW000318

NO	Nama Kapal	UPT	No Senpi
80	KN.P 496	KSOP Kelas II Samarinda	CC.FW000316
81	KN.P 341	KSOP Kelas II Pontianak	CC.FW000319
82	KN.P 341	KSOP Kelas II Pontianak	CC.FW000320
83	KN.P 342	KSOP Kelas III Sampit	CC.FW000321
84	KN.P. 438	KSOP Kelas III Sampit	CC.FW000322
85	KN.P 363	KSOP Kelas I Banjarmasin	CC.FW000323
86	KN.P 363	KSOP Kelas I Banjarmasin	CC.FW000324
87	KN.P 363	KSOP Kelas I Banjarmasin	CC.FW000325
88	KN.P 377	KSOP Kelas III Kotabaru Batulicin	CC.FW000326
89	KN.P. 475	KSOP Kelas III Kotabaru Batulicin	CC.FW000327
90	KN.P 346	KSOP Kelas II Teluk Bayur	CC.FW000328
91	KN.P 346	KSOP Kelas II Teluk Bayur	CC.FW000329
92	KN.P 421	KSOP Kelas II Teluk Bayur	CC.FW000330
93	KN.P 344	KSOP Kelas I Dumai	CC.FW000331
94	KN.P 344	KSOP Kelas I Dumai	CC.FW000332
95	KN.P 326	KSOP Kelas II Bena	CC.FW000333
96	KN.P 326	KSOP Kelas II Bena	CC.FW000334
97	KN.P 327	KSOP Kelas II Palembang	CC.FW000337
98	KN.P 327	KSOP Kelas II Palembang	CC.FW000338
99	KN.P. 472	KSOP Kelas II Palembang	CC.FW000336
100	KN.P.340	KSOP Kelas III Kupang	CC.FW000339
101	KN.P.340	KSOP Kelas III Kupang	CC.FW000340
102	KN.P.340	KSOP Kelas III Kupang	CC.FW000341
103	KN.P 359	KSOP Kelas III Pulau Baai	CC.FW000342
104	KN.P 359	KSOP Kelas III Pulau Baai	CC.FW000343
105	KN.P 339	KSOP Kelas II Jayapura	CC.FW000344
106	KN.P 339	KSOP Kelas II Jayapura	CC.FW000345
107	KN.P 339	KSOP Kelas II Jayapura	CC.FW000346
108	KN.P 335	KSOP Kelas III Biak	CC.FW000347
109	KN.P 335	KSOP Kelas III Biak	CC.FW000348
110	KN.P 335	KSOP Kelas III Biak	CC.FW000349
111	KN.P 351	KSOP Kelas IV Merauke	CC.FW000350

NO	Nama Kapal	UPT	No Senpi
112	KN.P 351	KSOP Kelas IV Merauke	CC.FW000351
113	KN.P 490	UPP Kelas III Pomako	CC.FW000352
114	KN.P 354	KSOP Kelas IV Manokwari	CC.FW000354
115	KN.P 354	KSOP Kelas IV Manokwari	CC.FW000355
116	KN.P 347	KSOP Kelas IV FakFak	CC.FW000353
117	KN.P 361	KSOP Kelas I Sorong	CC.FW000356
118	KN.P 361	KSOP Kelas I Sorong	CC.FW000357
119	KN.P 379	KSOP Kelas I Sorong	CC.FW000358
120	KN.P 379	KSOP Kelas I Sorong	CC.FW000359
121	KN.P. 474	KSOP Kelas III Tarakan	CC.FW000360
122	KN.P. 499	KSOP Kelas IV Malahayati	CC.FW000361
123	KN.P. 484	KSOP Kelas IV Sabang	CC.FW000362
124	KN.P 5211	KSOP Kelas I Panjang	CC.FW000363

KEGIATAN PEMBANGUNAN

- a. Pembangunan Kapal Patroli Kelas IV
- b. Pembangunan Kapal Patroli Kelas V

BAB VII

KETERLIBATAN *STAKEHOLDER*

Penandatanganan Perjanjian Konsesi diantaranya :

- a. Penandatanganan Perjanjian Konsesi antara Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Satui dengan PT Bina Indo Raya tentang Penyediaan dan/atau Pelayanan Jasa Kepelabuhanan di Terminal Bina Indo Raya
 - b. Penandatanganan Perjanjian Konsesi antara Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Banten dengan PT Batu Alam Makmur tentang Pengusahaan Jasa Kepelabuhanan pada Terminal Batu Alam Makmur
 - c. Penandatanganan Perjanjian Konsesi antara Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Tanjung Balai Karimun & PT Asinusa Putra Sekawan tentang Penyediaan dan/atau Pelayanan Jasa Kepelabuhanan pada Area Kegiatan Berlabuh Jangkar (Anchorage Area) dan Alih Muat Barang dari Kapal ke Kapal (Ship to Ship Transfer) di Wilayah Perairan Pualu Nipa
 - d. Penandatanganan Perjanjian Konsesi antara Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas pelabuhan kelas I Balikpapan Dengan PT Pelabuhan Penajam Banua Taka tentang penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan pada terminal PT Pelabuhan penajam Banua Taka di Pelabuhan Balikpapan
 - e. Penandatanganan Perjanjian Konsesi antara Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Rangga Ilung dengan PT Bangun Nusantara Jaya Makmur Perkasa tentang Penyediaan dan/atau Pelayanan Jasa Kepelabuhanan di Terminal Bangun Nusantara Jaya Mkamur Perkasa;
 - f. Penandatanganan Perjanjian Konsesi antara Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Balikpapan dengan PT Lestari Samudra Sakti tentang Penyediaan dan/atau Pelayanan Jasa Kepelabuhanan di Terminal Lestari Samudra Sakti;
1. Kerjasama Bilateral/Regional/Internasional/Multilateral
 - misalnya bekerjasama dengan Maritime and Port Authority of Singapore (MTA Singapore) menggelar VTS Operator Training Course, Gelar Latihan Bersama Penanggulangan Tumpahan Minyak di Laut (Regional Marpolex) dengan Philippine Coast Guard (PCG) dan Japan Coast Guard (JCG), sinergi dengan kementerian dan Lembaga, serta stakeholder terkait dengan Pengawasan dan Penataan Bawah Laut melalui pembentukan Tim Nasional Penataan Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut, dsb.
 2. Tanggung Jawab Sosial
 - misalnya Ditjen Hubla memberikan penghargaan kepada Para Duta Pelayanan Publik Berprestasi, CSR, dsb.

BAB VIII

REGULASI

Berisi uraian tentang penerbitan regulasi selama tahun anggaran

Permenhub no 5 tahun 2022 ttg tatacara pemberian konsesi dan kerjasama melalui mekanisme pelelangan

BAB IX

PENGELOLAAN KEUANGAN

Alokasi Pagu DIPA Awal dan Pagu DIPA-Revisi Tahun 2022 akan disampaikan pada tabel di bawah ini:

Tabel IX.1

Perbandingan Alokasi Pagu DIPA Awal dengan Pagu DIPA Akhir Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2022

No	Uraian	Pagu Awal	Pagu Akhir	Realisasi
1	Belanja Pegawai	135.510.660.000	107.684.494.000	107.334.969.890
2	Belanja Barang	244.967.930.000	236.498.794.000	235.475.628.292
3	Belanja Modal	16.389.544.000	11.504.081.000	11.411.375.528
TOTAL PAGU		396.868.134.000	1.465.395.290	
TOTAL REALISASI				354.221.973.710
TOTAL SISA DANA				1.465.395.290

Sumber data : OMSPAN dan Bagian Keuangan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Posisi 25 Januari 2023))

Selama Tahun 2022, Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut telah mengalami revisi anggaran sebanyak 14 (empat belas) kali dengan rincian sebagai berikut:

1. Revisi 1:

Blokir *Automatic Adjustment*

- Dari total pagu pembayaran gaji dan tunjangan sebesar Rp135.510.660.000,00, pagu tunjangan kinerja sebesar Rp66.537.298.000,00 mengalami blokir dalam rangka *automatic adjustment*.
- Terdapat blokir pada kegiatan Penyesuaian Ijazah tingkat Sarjana dan Pasca Sarjana tahap I di Bagian Kepegawaian sebesar Rp418.950.000,00 yang merupakan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
- Terdapat blokir pada kegiatan Pengelolaan dan Penatausahaan Barang Milik Negara di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sebesar Rp2.593.000.000,00 yang merupakan Belanja Perjalanan Dinas Biasa
- Terdapat blokir pada kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas (Kendaraan roda 2 sebesar Rp775.925.000,00 dan Kendaraan operasional sebesar Rp2.327.808.000)
- Terdapat blokir pada kegiatan Penyusunan Renja KL melalui Aplikasi SAKTI dan *E-Planning* beserta *tagging* Kegiatan PN, Kegiatan Strategis, Padat Karya pada rangkaian pagu alokasi anggaran DJPL-Bagian Perencanaan sebesar Rp700.245.000,00 yang merupakan Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota
- Terdapat blokir pada kegiatan Penyusunan dan Koordinasi Bahan Kebijakan Pimpinan-Bagian Perencanaan sebesar Rp450.156.000,00
- Terdapat blokir pada kegiatan Evaluasi dalam rangka Pemutakhiran Data PNB Semester II-Bagian Keuangan sebesar Rp722.988.000,00
- Terdapat blokir pada kegiatan Inventarisasi Data Perubahan Dokumen Anggaran dan *Updating* Data Perubahan Dokumen Anggaran pada UPT-Bagian Keuangan sebesar Rp538.650.000,00 yang merupakan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
- Terdapat blokir pada kegiatan Monitoring Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Aparat Fungsional Ekstern (BPK-RI, BPKP) di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sebesar Rp206.400.000,00
- Terdapat blokir pada kegiatan Monitoring Pelaksanaan Program Direktorat Jenderal Perhubungan Laut-Bagian Perencanaan sebesar Rp323.190.000,00
- Terdapat blokir pada kegiatan Peliputan dan Pemantauan Opini Publik Pelayanan Angkutan Laut-Bagian Organisasi dan Humas sebesar Rp394.380.000,00

- Terdapat blokir pada kegiatan Penyelenggaraan Pertemuan Bilateral Bidang Maritim-Bagian Hukum dan KSLN sebesar Rp104.352.000,00
- Terdapat blokir pada kegiatan Penyelenggaraan *Workshop* Teknik Diplomasi-Bagian Hukum dan KSLN sebesar Rp32.620.000,00
- Terdapat blokir pada kegiatan Koordinasi dengan Instansi lain di Bidang Hukum dan Pelayaran-Bagian Hukum dan KSLN sebesar Rp293.735.000
- Terdapat blokir pada kegiatan Penyusunan/Pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah-Bagian Hukum dan KSL sebesar Rp105.119.000,00

2. Revisi 2

Terdapat perubahan *Automatic Adjustment* dari revisi menjadi:

- Terdapat blokir pada kegiatan Pengelolaan dan Penatausahaan Barang Milik Negara di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sebesar Rp2.564.640.000,00 yang merupakan Belanja Perjalanan Dinas Biasa
- Terdapat blokir pada kegiatan Penyusunan Renja KL melalui Aplikasi SAKTI dan *E-Planning* beserta *tagging* Kegiatan PN, Kegiatan Strategis, Padat Karya pada rangkaian pagu alokasi anggaran DJPL-Bagian Perencanaan sebesar Rp153.960.000,00 yang merupakan Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota
- Terdapat blokir pada kegiatan Penyusunan dan Koordinasi Bahan Kebijakan Pimpinan-Bagian Perencanaan sebesar Rp1.092.339.000,00
- Terdapat blokir pada kegiatan Evaluasi dalam rangka Pemutakhiran Data PNB Semester II-Bagian Keuangan sebesar Rp2.287.269.000,00
- Terdapat blokir pada kegiatan Inventarisasi Data Perubahan Dokumen Anggaran dan *Updating* Data Perubahan Dokumen Anggaran pada UPT-Bagian Keuangan sebesar Rp669.150.000,00 yang merupakan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
- Terdapat blokir pada kegiatan Koordinasi dengan Instansi lain di Bidang Hukum dan Pelayaran-Bagian Hukum dan KSLN sebesar Rp274.961.000,00
- Terdapat blokir pada kegiatan Penyusunan/Pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah-Bagian Hukum dan KSL sebesar Rp66.648.000,00

3. Revisi 3

Automatic Adjustment Tahap 2 (Belanja Barang)

- Terdapat blokir pada kegiatan Pengelolaan dan Penatausahaan Barang Milik Negara di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sebesar Rp1.824.840.000,00 yang merupakan Belanja Perjalanan Dinas Biasa
- Terdapat blokir pada kegiatan Inventarisasi Data Perubahan Dokumen Anggaran dan *Updating* Data Perubahan Dokumen Anggaran pada UPT-Bagian Keuangan

sebesar Rp519.500.000,00 yang merupakan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota

- Terdapat blokir pada kegiatan Monitoring Pelaksanaan Program Direktorat Jenderal Perhubungan Laut-Bagian Perencanaan sebesar Rp466.830.000,00

4. Revisi 4

Terdapat perubahan sebagai berikut:

- Penyesuaian RPD (Rencana Penarikan Dana) di Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan.
- Terdapat blokir pada Tunjangan Kinerja sebesar Rp75.806.594.000,00
- Terdapat blokir pada kegiatan Inventarisasi Data Perubahan Dokumen Anggaran dan *Updating* Data Perubahan Dokumen Anggaran pada UPT-Bagian Keuangan sebesar Rp1.955.900.000,00 yang merupakan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
- Terdapat perubahan anggaran pada Studi/Kajian dari Rp29.670.162.000,00 menjadi Rp28.322.155.000,00
- Terdapat perubahan anggaran pada Program Dukungan Manajemen sebesar Rp359.935.419.000,00 menjadi Rp357.526.778.000,00

5. Revisi 5

- Pergeseran Belanja Pegawai ke Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan
- Terdapat blokir pada kegiatan Pembangunan Rumah Dinas Jabatan Eselon II (4 Unit) sebesar Rp4.286.372.000,00
- Terdapat blokir pada kegiatan Pra Studi Kelayakan (*Pra Feasibility Study*) Pembangunan Pelabuhan pada 15 Lokasi-Bagian Perencanaan sebesar Rp9.063.665.000,00
- Terdapat blokir pada kegiatan Pra Studi Kelayakan Pembangunan Pelabuhan Patimban sebesar Rp6.693.943.000,00
- Terdapat blokir pada kegiatan Evaluasi Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan UTP Direktorat Jenderal Perhubungan Laut-Bagian Organisasi dan Humas sebesar Rp286.300.000,00
- Terdapat blokir pada kegiatan Evaluasi Standar Operasional dan Prosedur-Bagian Organisasi dan Humas sebesar Rp154.000.000,00
- Terdapat blokir pada kegiatan Pelaksanaan Proses Pemberkasan Kenaikan Pangkat Terpadu-Bagian Kepegawaian sebesar Rp210.700.000,00
- Terdapat blokir pada kegiatan Evaluasi dan Pendataan Diklat Pegawai DJPL-Bagian Kepegawaian sebesar Rp196.800.000,00
- Terdapat blokir pada kegiatan Bimbingan Teknis Pengisian dan Pelaporan LHKPN dan LHKASN di Lingkungan DJPL-Bagian Kepegawaian sebesar Rp91.000.000,00

- Terdapat blokir pada kegiatan Penyusunan/Pembahasan Pola Mutasi di Lingkungan Ditjen Hubla sebesar Rp172.000.000,00
- Terdapat blokir pada kegiatan Pemeriksaan dan Penanganan Disiplin Pegawai Negeri Sipil- Bagian Kepegawaian sebesar Rp358.500.000,00
- Terdapat blokir pada Kegiatan Penyusunan Aplikasi E-Lapkin TA 2021 di Lingkungan DJPL-Bagian Kepegawaian sebesar Rp342.342.000,00
- Terdapat blokir pada Kegiatan Penyusunan Tanda Penghargaan Satya Lancana Karya Satya X,XX, dan XXX tahun di Lingkungan DJPL- Bagian Kepegawaian sebesar Rp271.800.000,00
- Terdapat blokir pada Kegiatan Pengadaan Tenaga Pendukung Dalam Rangka Pengelolaan dan Penatausahaan Barang Milik Negara di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut - Bag. Umum dan Perlengkapan Sebesar Rp500.000.000,00
- Terdapat blokir pada kegiatan Penyusunan Renja KL melalui Aplikasi SAKTI dan *E-Planning* beserta *tagging* Kegiatan PN, Kegiatan Strategis, Padat Karya pada rangkaian pagu alokasi anggaran DJPL-Bagian Perencanaan sebesar Rp1.091.576.000,00
- Terdapat blokir pada kegiatan Penyusunan Program/Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) - Bagian Perencanaan sebesar Rp1.049.510.000,00
- Terdapat blokir pada Koordinasi Pelaksanaan Program/ Kegiatan Strategis dan Direktif Pimpinan Ditjen Perhubungan Laut - Bagian Perencanaan Rp582.400.000,00
- Penyusunan Program Kerja dan Perencanaan Kegiatan Pada Bagian Kepegawaian - Bag. Kepegawaian Rp307.500.000,00
- Penyusunan Dokumen Reviu Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021 di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut - Bag. Perencanaan Rp413.712.000,00
- Terdapat blokir pada kegiatan Evaluasi dalam rangka Pemutakhiran Data PNBSP Semester II-Bagian Keuangan sebesar Rp 2.355.247.000,00
- Terdapat blokir pada kegiatan Monitoring Dan Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit Aparat Fungsional Intern (Itjen) Dan Monitoring TP/TGR - Bag. Keuangan sebesar Rp140.000.000,00
- Terdapat blokir pada kegiatan Penyusunan Dokumen Anggaran - Bag. Keuangan sebesar Rp1.355.968.000,00
- Terdapat blokir pada kegiatan Pendataan / Perhitungan SPT Tahunan Pegawai Kantor Pusat - Bag. Keuangan sebesar Rp50.000.000,00
- Terdapat blokir pada kegiatan Monitoring Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Aparat Fungsional Ekstern (BPK-RI, BPKP) di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sebesar Rp824.417.000,00
- Terdapat blokir pada kegiatan Monitoring Pelaksanaan Program Direktorat Jenderal Perhubungan Laut-Bagian Perencanaan sebesar Rp1.192.338.000,00

- Terdapat blokir pada kegiatan Konsultan Perencana Pembangunan Rumah Dinas Jabatan - Bag. Umum Dan Perlengkapan sebesar Rp500.000.000,00
- Terdapat blokir pada kegiatan Bimtek Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lkip), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Spip) Dan Aplikasi Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut - Bag. Perencanaan sebesar Rp1.006.128.000,00
- Terdapat blokir pada Kegiatan Updating Capaian Kinerja Pelaksanaan Program Direktorat Jenderal Perhubungan Laut - Bag. Perencanaan sebesar Rp739.800.000,00
- Terdapat blokir pada kegiatan Penyiapan Bahan Laporan Analisa Dan Evaluasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2022 - Bag. Perencanaan sebesar Rp370.080.000,00
- Terdapat blokir pada kegiatan Penyusunan Dokumen Lanjutan Penetapan PSSA Selat Lombok - Bag. Hukum dan KSLN sebesar Rp1.232.339.000,00
- Terdapat blokir pada kegiatan Sosialisasi Sistem Informasi Ditjen Hubla Bag. Organisasi dan Humas sebesar Rp892.839.000,00
- Terdapat blokir pada kegiatan Sosialisasi Peraturan Menteri Perhubungan di Bidang Transportasi Laut Di Lingkungan Ditjen Hubla Wilayah Barat - Bag. Hukum dan KSLN sebesar Rp151.589.000
- Terdapat blokir pada kegiatan Sosialisasi Peraturan Pemerintah dan Peraturan Pelaksanaannya di Bidang Transportasi Laut - Bag. Hukum dan KSLN sebesar Rp144.930.000
- Terdapat blokir pada kegiatan Koordinasi dengan Instansi lain di Bidang Hukum dan Pelayaran-Bagian Hukum dan KSLN sebesar Rp424.961.000,00
- Terdapat blokir pada kegiatan Penyusunan / Pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah - Bag. Hukum Dan KSLN sebesar Rp66.648.000
- Terdapat blokir pada kegiatan Penyusunan / Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri - Bag. Hukum dan KSLN sebesar Rp1.084.352.000

6. Revisi 6

Penghapusan Hal.IV B untuk kegiatan IT yang terdiri dari Belanja Barang Non Operasional Lainnya:

- Pemeliharaan Portal Hubla senilai Rp200.000.000,00 dihapus sebesar Rp191.300.000,00
- Pemeliharaan Server Eksisting Tahun 2022 senilai Rp200.000.000,00 dihapus sebesar Rp191.300.000,00
- Pemeliharaan Sistem Elektronik Hubla Terintegrasi senilai Rp200.000.000,00 dihapus sebesar Rp191.300.000,00
- Pemeliharaan Sistem Elektronik Hubla Terintegrasi senilai Rp900.000.000,00 dihapus sebesar Rp881.800.000,00

7. Revisi 7

- Terdapat blokir pada pra Studi Kelayakan Pembangunan Pelabuhan Pada 14 Lokasi Adapun upaya – upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan Daya Serap Direktorat Jenderal Perhubungan Laut senilai Rp8.914.878.000
- Terdapat blokir pada kegiatan Evaluasi Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan UPT Ditjen Hubla - Bag. Organisasi dan Humas (Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota-Hotel) sebesar Rp50.000.000,00
- Terdapat blokir pada kegiatan Evaluasi Standar Operasional dan Prosedur UPT - Bag. Organisasi dan Humas (Belanja Perjalanan Dinas Biasa-Transport) sebesar Rp50.000.000,00
- Terdapat blokir pada kegiatan Penyesuaian Ijazah tingkat Sarjana dan Pasca Sarjana tahap I di Bagian Kepegawaian sebesar Rp300.000.000,00 yang merupakan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (penginapan)
- Terdapat blokir pada kegiatan Evaluasi dan Pendataan Diklat Pegawai DJPL- Bagian Kepegawaian sebesar Rp183.680.000,00
- Terdapat blokir pada kegiatan Bimbingan Teknis Pengisian dan Pelaporan LHKPN dan LHKASN di Lingkungan DJPL-Bagian Kepegawaian sebesar Rp141.000.000,00 (Belanja Perjalanan Dinas Biasa-Penginapan)
- Terdapat blokir pada Kegiatan Penyusunan Aplikasi E-Lapkin TA 2021 di Lingkungan DJPL-Bagian Kepegawaian sebesar Rp350.900.000,00 yang merupakan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Penginapan)
- Terdapat blokir pada Kegiatan Penyusunan Tanda Penghargaan Satya Lancana Karya Satya X,XX, dan XXX tahun di Lingkungan DJPL- Bagian Kepegawaian sebesar Rp 266.760.000,00 (Belanja Perjalanan Dinas Biasa-Penginapan)
- Terdapat blokir pada kegiatan Pengelolaan dan Penatausahaan Barang Milik Negara di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sebesar Rp1.200.000.000,00 yang merupakan Belanja Perjalanan Dinas Biasa
- Terdapat blokir pada kegiatan Layanan Perkantoran Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja- Tunjangan Kinerja) sebesar Rp84.406.743.000,00
- Terdapat blokir pada kegiatan Penyusunan Renja K/L Melalui Aplikasi Sakti dan E-Planning Beserta Taging Kegiatan PN, Kegiatan Strategis, Padat Karya pada Rangkaian Pagu Alokasi Anggaran DJPL-Bagian Perencanaan pada Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Penginapan/ Uang Harian/ Transportasi) sebesar Rp1.499.734.000,00 dan Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (Meeting Fullboard Tahap I) sebesar Rp100.000.000,00
- Terdapat blokir pada kegiatan Penyusunan Program/Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) - Bagian Perencanaan, Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Penginapan/Uang Harian/ Transportasi) sebesar Rp 652.003.000,00 dan

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Penginapan / Uang Harian) sebesar Rp624.158.000,00

- Terdapat blokir pada Koordinasi Pelaksanaan Program/ Kegiatan Strategis dan Direktif Pimpinan Ditjen Perhubungan Laut - Bagian Perencanaan Rp333.017.000,00
- Terdapat blokir pada Kegiatan Penyusunan Program Kerja dan Perencanaan Kegiatan Pada Bagian Kepegawaian - Bag. Kepegawaian Rp 255.512.000,00
- Terdapat blokir pada kegiatan Evaluasi dalam rangka Pemutakhiran Data PNBPN Semester II-Bagian Keuangan Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19 sebesar Rp 67.978.000,00 dan Perjalanan Dinas Dalam Kota sebesar Rp2.287.269.000,00
- Terdapat blokir pada kegiatan Monitoring Dan Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit Aparat Fungsional Intern (Itjen) dan Monitoring TP/TGR - Bag. Keuangan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (penginapan) sebesar Rp130.000.000,00
- Terdapat blokir pada kegiatan Inventarisasi Data Perubahan Dokumen Anggaran dan Updating Data Perubahan Dokumen Anggaran pada UPT-Bagian Keuangan sebesar Rp1.892.211.000,00 yang merupakan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
- Terdapat blokir pada kegiatan Penyusunan Dokumen Anggaran - Bag. Keuangan Belanja Bahan (ATK) sebesar Rp60.818.000,00 dan Perjalanan Dinas Dalam Kota sebesar Rp2.656.839.000,00
- Terdapat blokir pada Kegiatan Updating Capaian Kinerja Pelaksanaan Program Direktorat Jenderal Perhubungan Laut - Bag. Perencanaan Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Transportas/ Uang Harian/ Penginapan) sebesar Rp 443.880.000,00 dan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Transportas/ Uang Harian/ Penginapan) sebesar Rp1.269.698.000,00
- Terdapat blokir pada Kegiatan Bimtek Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Aplikasi Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut - Bag. Perencanaan Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (Fullboard) sebesar Rp785.992.000,00
- Terdapat blokir pada Kegiatan Updating Capaian Kinerja Pelaksanaan Program Direktorat Jenderal Perhubungan Laut - Bag. Perencanaan sebesar Rp493.600.000,00
- Terdapat blokir pada Kegiatan Penyiapan Bahan Laporan Analisa dan Evaluasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2022 - Bag. Perencanaan sebesar Rp50.000.000,00
- Terdapat blokir pada Kegiatan Webinar Internasional Peringatan Hari Perhubungan Nasional - Bag. Hukum dan KSLN sebesar Rp104.352.000,00
- Terdapat blokir pada kegiatan Sosialisasi Sistem Informasi Ditjen Hubla Bag. Organisasi dan Humas sebesar Rp 277.086.000,00

- Terdapat blokir pada kegiatan Sosialisasi Peraturan Menteri Perhubungan di Bidang Transportasi Laut Di Lingkungan Ditjen Hubla Wilayah Barat - Bag. Hukum dan KSLN sebesar Rp 85.000.000,00
 - Terdapat blokir pada kegiatan Sosialisasi Peraturan Pemerintah dan Peraturan Pelaksanaannya di Bidang Transportasi Laut - Bag. Hukum dan KSLN sebesar Rp50.000.000,00
 - Terdapat blokir pada kegiatan Penyusunan / Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri - Bag. Hukum dan KSLN sebesar Rp1.630.808.375,00
8. Revisi 8
- Terdapat blokir pada kegiatan Layanan Perkantoran berupa tunjangan kinerja sebesar Rp83.506.743.000
 - Terdapat blokir pada kegiatan Penyusunan Dokumen Anggaran - Bag. Keuangan Belanja Bahan (ATK) sebesar Rp 80.818.000,00
 - Terdapat blokir pada kegiatan Penyusunan Dokumen Lanjutan Penetapan PSSA Selat Lombok - Bag. Hukum dan KSLN berupa Belanja Barang Non Operasional Lainnya Rp3.000.000,00, honor pokja sebesar Rp 2.730.000, dan Belanja Jasa Konsultan sebesar Rp1.226.609.000
9. Revisi 9
- Terdapat blokir pada kegiatan Layanan Perkantoran berupa tunjangan kinerja sebesar Rp58.366.733.000
10. Revisi 10
- Tidak ada tambahan blokir
11. Revisi 11
- Terdapat blokir pada kegiatan Layanan Perkantoran berupa tunjangan kinerja sebesar Rp50.975.597.000
12. Revisi 12
- Tidak ada tambahan blokir
13. Revisi 13
- Terdapat blokir pada kegiatan Layanan Perkantoran berupa tunjangan kinerja sebesar Rp50.415.897.573
14. Revisi 14
- Sudah tidak terdapat kegiatan yang diblokir

BAB X

1. Pengembangan dan pemeliharaan sistem inaportnet, sistem pelayanan terpadu, (SIMPADU) dan sistem persetujuan syahbandar (SPS) dengan nilai pagu Rp. 2.430.412.710

Untuk mengintegrasikan sistem informasi kepelabuhanan yang standar dalam melayani kapal dan barang secara fisik dari seluruh instansi dan pemangku kepentingan, Kementerian Perhubungan menerapkan Inaportnet, yakni sistem layanan tunggal secara elektronik berbasis internet. Dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap kapal dan barang di pelabuhan, pada tahun 2022 pelayanan inaportnet akan diterapkan pada 32 (Tiga Puluh Dua) pelabuhan yakni 1 (satu) pelabuhan KSOP kelas III, 23 (dua puluh tiga) Pelabuhan KSOP Kelas IV, 1 (satu) Pelabuhan UPP Kelas I, 2 (dua) Pelabuhan UPP Kelas II. Perluasan penerapan inaportnet di 32 pelabuhan pada tahun 2022 sehingga total pelabuhan yang mengimplementasikan inaportnet menjadi 109 pelabuhan. INAPORTNET adalah Sistem informasi layanan secara elektronik berbasis internet yang mengintegrasikan sistem informasi kepelabuhanan dengan terstandar guna melayani kapal dan barang bagi seluruh Instansi terkait atau pemangku kepentingan di pelabuhan (termasuk sistem layanan Badan Usaha Pelabuhan / BUP, pergerakan PBM, JPT dan Terminal Operator).

Penerapan Inaportnet



Gambar X.1
Implementasi inaportnet pada 109 Pelabuhan tahun 2022

Pada tanggal 12 sampai 13 September 2022 di Laprima Hotel Labuan Bajo diadakan Acara sosialisasi inaportnet yang dihadiri sebanyak 43 orang peserta diantaranya dari Tim dari Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut, perwakilan perusahaan pelayaran, BUP Pelindo, Pertamina, perwakilan dari Tersus dan para stakeholder lainnya. Pada kesempatan itu Direktur Lalu Lintas Dan Angkutan Laut dalam sambutannya dibacakan Capt. Hasan Sadeli menyampaikan bahwa tujuan dari pada penerapan inaportnet ini sangat menguntungkan dan efisien waktu para pengguna jasa kepelabuhanan



Gambar X.2

Kegiatan Sosialisasi Penerapan Inaportnet di Pelabuhan Labuan Bajo

Untuk mengintegrasikan sistem informasi kepelabuhanan yang standar dalam melayani kapal dan barang secara fisik dari seluruh instansi dan pemangku kepentingan, Kementerian Perhubungan menerapkan Inaportnet, yakni sistem layanan tunggal secara elektronik berbasis internet. Keberhasilan implementasi inaportnet di pelabuhan ditunjang oleh sumber daya manusia yang akan melaksanakannya. Guna meningkatkan pemahaman inaportnet, telah diselenggarakan Bimbingan Teknis Peningkatan Keterampilan SDM Bidang Lalu Lintas dan Angkutan dalam Penerapan Inaportnet pada tanggal 23 – 26 Maret 2022 dilaksanakan di Hotel Haris Semarang.

Pelaksanaan Bimbingan Teknis Peningkatan Keterampilan SDM Bidang Lalu Lintas dan Angkutan dalam Penerapan Inaportnet tersebut diharapkan mampu memberikan pemahaman tentang inaportnet sehingga dapat melaksanakannya di wilayah kerja masing-masing.



Gambar X.3

Kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Keterampilan SDM Bidang Lalu Lintas dan Angkutan dalam Penerapan Inaportnet pada tanggal 23 – 26 Maret 2022 dilaksanakan di Hotel Haris Semarang

KEGIATAN PENUNJANG

Berisi uraian tentang pengelolaan anggaran dan daya serap serta kesulitan yang dihadapi.

1. Berisi uraian kegiatan yang sifatnya rutin / tahunan, sesuai dengan tugas dan fungsinya dan/atau kegiatan yang sifatnya situasional;
2. Dapat juga berupa pemberian penghargaan di lingkungan internal unit kerja.

BAB XI

PENUTUP